

ANALISIS PENGARUH BELANJA BANTUAN SOSIAL DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA.*ANALYSIS OF THE EFFECTS OF SOCIAL ASSISTANCE SPENDING AND PRIVATE INVESTMENT ON POVERTY IN THE PROVINCE OF NORTH SULAWESI.***Celeste.Ch.E.Rarun¹, George M.V. Kawung², Audie O.Niode³**^{1,2,3}*Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia*Email : rarunceleste@gmail.com**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan bangsa yang mendesak sehingga pemerintah berupaya untuk mengatasi masalah tersebut melalui kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui belanja bantuan sosial dan investasi swasta. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh belanja bantuan sosial dan Investasi Swasta terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan begitu juga dengan Investasi Swasta memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan dan secara bersama-sama Belanja Bantuan Sosial Pemerintah dan Investasi Swasta memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci : Kemiskinan, Belanja Bantuan Sosial, Investasi Swasta.**ABSTRACT**

Poverty is an urgent nation issue that the government seeks to address the problem through its Poverty Reduction policy through social assistance and private investment. Based on this, the purpose of this study was to determine the effect of social assistance expenditure and Private Investment on poverty in North Sulawesi Province. The method of analysis used in this study is the Ordinary Least Square. The results showed that social assistance expenditures have a negative influence and significant to poverty, as well Private Investment has an negative influence and significant to poverty and together Government Social Assistance Expenditures and Private Investments have a influence and significant impact on Poverty in the province of North Sulawesi.

Keywords : Poverty, Social Assistance Spending, Private Investment.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam Pembangunan ekonomi yang menjadi pusat perhatian pemerintah di semua negara, kompleksnya permasalahan kemiskinan membuatnya terus menjadi masalah serius dan penting di belahan dunia, termasuk salah satunya adalah negara Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang individu atau kelompok dalam suatu masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang diakibatkan oleh tingkat pendapatan yang rendah .

Selama periode tahun 2014 – 2016, penduduk miskin di Indonesia berfluktuasi baik secara relatif maupun absolut pada bulan Maret 2015 mengalami kenaikan dibandingkan September 2014. Pergerakan naik turun angka kemiskinan di pengaruhi oleh Sumber penghasilan utama penduduk sangat mempengaruhi tingkat pendapatannya, di perdesaan sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian. Tingkat pendapatan penduduk dari pertanian sepertinya tidak dapat mengejar kenaikan harga-harga barang di daerah perdesaan, begitu pula dengan angka kemiskinan di kota yang di pengaruhi oleh kenaikan harga barang dimana jika terjadi kenaikan harga barang akan menurunkan kemampuan untuk konsumsi barang/jasa dengan tingkat pendapatan masyarakat yang tetap.

Provinsi Sulawesi utara yang merupakan salah satu wilayah administratif dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengalami hal tersebut. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) diketahui bahwa Penduduk miskin di Sulawesi Utara masih didominasi penduduk di daerah perdesaan. Pola tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya, Faktor inflasi atau kenaikan harga-harga barang merupakan salah satu pemicu naiknya angka kemiskinan di Sulawesi Utara. Karena jika harga barang naik tidak diikuti dengan naiknya pendapatan per kapita akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, sehingga terdapat sebagian penduduk yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan sehingga tersebut dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan seperti gizi buruk (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara : Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara 2016 : hal 16).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah baik pusat dan daerah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui sebuah kebijakan yang di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut membutuhkan Pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja yang bersentuhan langsung dengan program penanggulangan kemiskinan adalah belanja Bantuan Sosial. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan

keagamaan. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Pihak swasta juga memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan. Selain belanja bantuan sosial yaitu melalui investasi yang dilakukan oleh pihak swasta melalui penanaman modal. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).

Keuntungan adanya modal asing yaitu berupa diolahnya sumber daya alam kita, meningkatnya lapangan pekerjaan, meningkatnya penerimaan negara dari sumber pajak, serta adanya alih teknologi. Bagi pemilik modal, keuntungan mereka berupa deviden dari hasil usaha (Suparmoko dan Irawan, 1996: 87-88). Terciptanya lapangan pekerjaan akan memberikan pendapatan bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi (membeli barang/jasa) untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang pada awalnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dengan adanya bantuan dari pemerintah melalui belanja bantuan sosial maka akan mengurangi beban masyarakat yang dikategorikan penduduk miskin baik dalam bentuk uang/barang oleh pemerintah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat semakin tinggi. Sedangkan Ekonomi Pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi dinegara-negara berkembang dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi (Sadono Sukirno, 2006. Ekonomi Pembangunan ; Proses, Masalah, dan dasar Kebijakan : hal 3).

Kemiskinan

Supriatna, (1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Emil Salim

(dalam Supriatna.1997, Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan : hal 82) mengemukakan lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri, 2) Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, 3) Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, 4) Banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas, dan 5) Di antara mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

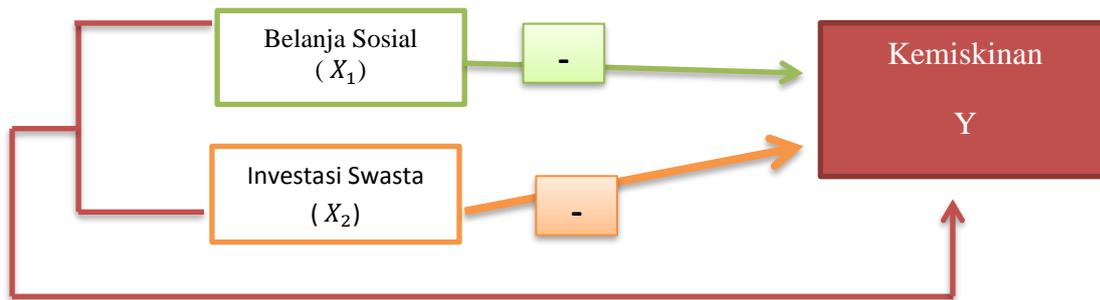
Belanja Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 meliputi: individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Penanaman Modal.

investasi menurut Sunariyah (2003:4) Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang". Kemudian yang dimaksud dengan Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia (pasal 1 ayat (1), UU Republik Indonesia NO. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal). Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki.

Kerangka Berpikir.

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Toritis
“Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor dan sifat-sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Analisis deskriptif adalah analisis berupa grafik, tabel, gambar dan penjelasan melalui kata-kata sedangkan analisis kuantitatif merupakan analisis berupa angka-angka sehingga dapat diramal dan merupakan realitas sosial, objektif dan dapat diukur (Yusuf, Muri 2014:62).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, dan tidak langsung didapatkan oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau laporan yang sudah tersedia. Data sekunder ini biasanya diperoleh dari otoritas atau pihak yang mempunyai kewenangan (Wiyono, Gendro. 2011: 131). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk buku Sulut dalam Angka tahun 2006-2017 dan www.Bps.sulut.go.id, literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan antara lain adalah Jumlah total Penduduk Miskin, Belanja Bantuan Sosial Pemerintah dan Investasi Swasta Provinsi Sulawesi utara Tahun 2005-2016.

Metode Analisis.

Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan program Eviews 8.0 dengan metode analisis Ordinary least Square. Ordinary Least Square (OLS) adalah suatu metode ekonometrik dimana terdapat variable independen yang merupakan variable penjelas dan variable dependen yaitu variable yang dijelaskan dalam suatu persamaan linier. OLS merupakan metode regresi yang meminimalkan jumlah kesalahan (error) kuadrat. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan bentuk fungsi double-log dimana variabel-variabel yang digunakan yaitu non linier, tetapi koefisiennya tetap linier. Dalam bentuk fungsi double-log, logaritma alam Y sebagai variabel dependen dan Logaritma alam X sebagai Variabel independen (sarwoko,2005:94-95).

Maka bentuk fungsinya merupakan fungsi eksponensial yang dapat dilihat pada persamaan (3.1).

$$\ln Y_t = a X_{1t}^{\beta_1} X_{2t}^{\beta_2} e^{\mu_t}$$

Selanjutnya persamaan tersebut di transformasikan ke dalam bentuk double log (log-log) ke dalam persamaan (3.2) yang kemudian digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

$$\ln Y_t = a + \beta_1 \ln X_{1t} + \beta_2 \ln X_{2t} + \mu_t$$

Keterangan :

- t = menunjukkan runtun waktu (time series)
- μ = Kesalahan yang disebabkan faktor acak
- a = constanta
- $\ln Y$ = Kemiskinan (variabel dependen yang di Ln)
- $\ln X_1$ = Belanja Bantuan Sosial (variabel independen yang di Ln)
- $\ln X_2$ = Investasi Swasta (variabel independen yang di Ln)
- $\beta_1 \beta_2$ = Parameter elastisitas.

Uji multikolinearitas.

Jika terbukti ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali (Singgih Santoso, 2012:234). untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Batas VIF adalah 10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas (Gujarati, 2012:432). Selain itu gejala multikolinearitas dapat dilihat melalui Coefficient Matrix, jika korelasi antara sesama variabel bebas lebih rendah dari 0,5 maka tidak terjadi gejala multi kolinearitas antara variabel bebas (santoso & Ashari, 2005: Analisis Statistic dengan Microsoft Excel dan SPSS : 238-240).

Uji Autokorelasi.

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu dapat dilakukan dengan uji Breusch-Godfrey atau BG atau LM test. jika $(n-p) R^2$ yang merupakan chi square χ^2 hitung lebih besar dari nilai kritis chi squares χ^2 pada derajat kepercayaan tertentu α , artinya model tidak mengalami autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas, tetapi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji white. Uji white menggunakan residual kuadrat sebagai variabel dependent, dan variabel independennya terdiri atas variabel independent yang sudah ada, ditambah dengan kuadrat variabel independent, ditambah lagi dengan perkalian dua variabel independent

(Wing. W. Winarno, 2017 : 5.8, 5.17 , 5.28). Jika nilai Probalitas pada hasil lebih kecil dari $\alpha=0,05\%$ maka dapat kita simpulkan bahwa data tersebut bersifat heterokedastisitas

Uji Normalitas.

Salah satu asumsi dalam penerapan OLS (*Ordinary Least Square*) dalam regresi linier klasik adalah distribusi probabilitas dari gangguan U_t memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan memiliki varian yang konstan. Untuk menguji apakah distribusi data normal dilakukan dengan uji *Jarque Bera* atau *J-B test*. Uji Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtois data (Winarno, 2017: 5.40 -5.42). Jika nilai $J - B$ hitung tidak signifikan (lebih kecil dari 2) maka data berdistribusi normal, atau bisa dilihat dari nilai probability lebih besar dari taraf nyata 0,05 persen. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual U_t terdistribusi normal (Winarno, 2017 : 5.40 -5.42).

C. Hasil dan Pembahasan

Estimasi Model Penelitian.

Estimasi Model Regresi berganda untuk Kemiskinan yang di pengaruhi oleh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta dalam penelitian ini adalah :

Tabel 4.1 Hasil estimasi model penelitian

Y Kemiskinan = 14.83412 – 0.0280818 Belanja Bantuan Sosial – 0.06737 Investasi Swasta		
T-hitung	-2,059508*	-3.371834**
Probability	0.0695	0.0082
F-Hitung	5.698806	
F-probability	0.025176	
R2	0.558772	

Sumber : Hasil Regresi (2018)

Keterangan :

** Signifikan pada α (5%) = 0.05

* Signifikan pada α (10%) = 0.1

Intrepretasi Model.

Berdasarkan hasil regresi dapat dijelaskan pengaruh variabel bebas yaitu Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan sebagai berikut :

1. Jika belanja bantuan sosial pemerintah dan investasi swasta adalah nol maka kemiskinan bernilai 14,83 %
2. Belanja Bantuan sosial memiliki pengaruh negatif karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi Belanja Bantuan Sosial yaitu sebesar (-0.028018). artinya setiap kenaikan 1 % Belanja Bantuan Sosial maka akan menurunkan atau mengurangi penduduk miskin sebesar 0,028018 % .

3. Investasi Swasta memiliki pengaruh negatif karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi investasi swasta yaitu sebesar (-0.0673707) . Artinya jika terjadi kenaikan investasi swasta sebesar 1 % akan mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 0.06 %.

Hasil Uji t

Pengujian secara individual ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas memiliki pengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat besarnya t-hitung dan angka probabilitas dari variabel Independent.

1) Menentukan formulasi Ho dan Ha.

- Ho : $\beta_1, \beta_2 = 0$ artinya variabel independent tidak berpengaruh negatif terhadap variabel dependent.
- Ha : $\beta_1, \beta_2 \leq 0$ artinya variabel independent memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel dependent.

2) Tes Statistik

- Jika T-hitung < T-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
- Jika T-hitung > T-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

3) Dengan Df = n-k-1 = 9, maka T-tabel = 1,833 dengan $\alpha = 0.05$.

4) Dengan Df = n-k-1 = 9, maka T-tabel = 1,383 dengan $\alpha = 0.1$

Maka hasil penelitian sebagai berikut :

1. Belanja Bantuan Sosial memiliki T-hitung = 2,0696 > 1,383 dengan arah yang negatif maka belanja bantuan sosial memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan

2. Investasi Swasta memiliki T-hitung = 3,371834 > 1,833 dengan arah yang negatif maka dengan demikian belanja bantuan sosial berpengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan karena nilai probabilitasnya = 0,0082 < 0,05.

Hasil Uji F.

Dengan Df = n-k = 12-2 = 10, maka F-tabel = 4,10 maka hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

F-hitung = 5,69 > 4,10 maka dengan demikian Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi utara dan signifikan karena dilihat dari nilai probabilitasnya = 0,02 < 0,05.

Hasil uji Koefisien determinan.

Besarnya Koefisien R-square adalah $R^2 = 0.5587$ angka tersebut mempunyai makna 55,87 % variasi variabel dependent Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independent yaitu Belanja Bantuan Sosial dan investasi swasta sisanya sebesar 44,13 merupakan variabel lain yang mempengaruhi kemiskinan tetapi tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil Uji multikolinearitas.

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.664028	1508.443	NA
BELANJA_BANTUAN_SOSIAL	0.000185	238.0379	1.726920
INVESTASI_SWASTA	0.000398	733.3284	1.726920

Sumber : Hasil regresi (2018)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai Coefficient Matriks antara kedua variabel lebih rendah dari 0,5 sehingga dengan demikian tidak terdapat gejala multikolinearitas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Autokorelasi.

Tabel 4.3 Hasil Penelitian Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.677345	Prob. F(2,7)	0.5384
Obs*R-squared	1.945767	Prob. Chi-Square(2)	0.3780

Sumber : hasil regresi (2018)

Berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa nilai Obs*R-squared = 1,945767 dengan Prob. Chi-square = 0,3780 > 0,05 sehingga tidak terjadi masalah autokorelasi dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

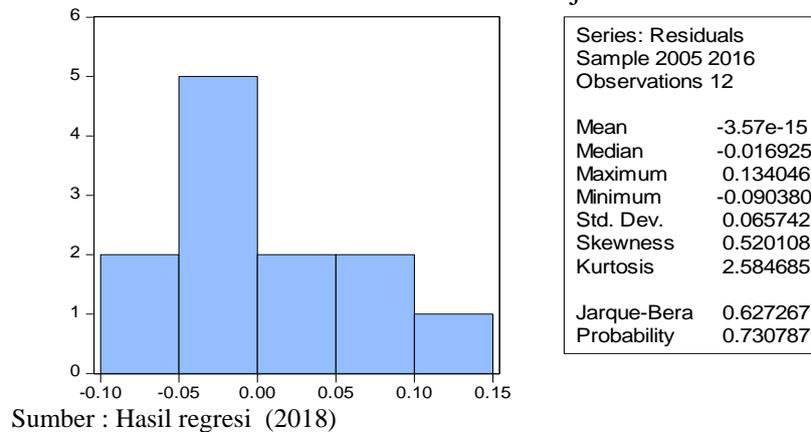
F-statistic	0.569112	Prob. F(2,9)	0.5851
Obs*R-squared	1.347246	Prob. Chi-Square(2)	0.5099
Scaled explained SS	0.600457	Prob. Chi-Square(2)	0.7406

Sumber : hasil regresi (2018)

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa Prob.Chi-Square = 0,5099 > 0,05 dimana hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heterokedastisitas.

Hasil Uji Normalitas.

Tabel 4.5 Grafik.hasil Uji Normalitas



Berdasarkan hasil penelitian, nilai probability = 0,730787 lebih besar dari taraf nyata 0,05 persen. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa residual Ut terdistribusi normal.

Pembahasan Hasil Penelitian**a. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan**

Berdasarkan hasil regresi, variabel Belanja Bantuan Sosial (X1) memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Bantuan Sosial menunjukkan tanda negatif, yaitu sebesar $(-0,0295501)$ artinya bahwa jika belanja bantuan Sosial naik 1% maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0.0295501 %. Belanja bantuan sosial memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi utara. Hal tersebut memberikan makna bahwa dengan adanya pengeluaran oleh pemerintah dalam bentuk belanja bantuan sosial dapat menurunkan angka kemiskinan yaitu jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu di benahi dan di kontrol seperti penerima bantuan tersebut agar merupakan individu atau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut.

b. Pengeruh Investasi Swasta terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan hasil regresi, variabel Investasi Swasta (X2) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. Nilai koefisien regresi untuk variabel Investasi Swasta yaitu (-0.067307) menunjukkan tanda negatif, yaitu artinya bahwa jika belanja bantuan Sosial naik 1% maka jumlah penduduk miskin akan turun sebesar 0.06737 %. Hasil analisis menunjukkan bahwa Variabel Belanja bantuan Sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Bahwa dengan adanya peningkatan investasi melalui Penanaman modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing akan memberikan dampak negatif terhadap kemiskinan dimana dengan adanya peningkatan investasi memberikan peluang kesempatan kerja bagi tenaga kerja untuk bekerja serta dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

Tetapi sejauh ini penanaman modal asing lebih dominan dibandingkan dengan Penanaman modal dalam negeri maka diharapkan kedepannya agar splananaman modal dalam negeri bisa meningkat agar tidak kalah bersaing dengan Investor luar negeri dimana hal tersebut dipengaruhi oleh kemampuan investor dalam negeri, minat investor dalam negeri serta peluang dan kesempatan untuk investor dalam negeri tetapi juga hal tersebut tergantung oleh regulasi kebijakan penanaman modal dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai eksekutor kebijakan.

c. Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta terhadap Kemiskinan.

Berdasarkan hasil regresi, variabel Belanja Bantuan Sosial dan investasi swasta memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kemiskinan. Artinya jika belanja bantuan sosial dan investasi secara bersama-sama dialokasikan secara tepat guna dan tepat sasaran maka akan menurunkan kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bantuan sosial tidak diberikan secara terus menerus dan selektif dimana pemberian bantuan tersebut hanya diberikan bagi yang membutuhkan saja karena tergantung dari tujuan pemberian bantuan tersebut apa bila penduduk tersebut sudah tidak miskin lagi atau sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri maka pemberian bantuan tersebut dapat dihentikan yang kemudian dialihkan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan tersebut.

Karena dengan adanya usaha pemerintah untuk peningkatan Investasi Swasta di Provinsi Sulawesi Utara dapat memberikan peluang kesempatan kerja yang dimana adanya penyerapan tenaga kerja yang membuat penduduk yang awalnya tidak memiliki pendapatan dapat memiliki pendapatan dan membuat penduduk yang dikategorikan miskin tersebut dapat bergeser kedudukannya menjadi penduduk yang tidak miskin karena terjadi perubahan tingkat pendapatan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Bantuan sosial memiliki pengaruh negatif dan signifikan artinya jika belanja bantuan sosial naik maka akan menurunkan angka kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa Investasi Swasta memiliki pengaruh negatif dan signifikan artinya jika investasi swasta naik maka akan menurunkan angka kemiskinan di provinsi sulawesi utara.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa Belanja Bantuan Sosial dan Investasi Swasta memiliki pengaruh negatif dan signifikan artinya jika belanja bantuan sosial dan investasi swasta bersama-sama mengalami peningkatan maka akan menurunkan angka kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara.

Saran

1. Meningkatnya investasi swasta dapat menurunkan kemiskinan maka diharapkan pemerintah untuk lebih memerhatikan regulasi kebijakan-kebijakan investasi agar kebijakan tersebut dapat berdampak positif terhadap investasi swasta selain itu perlu juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar sasaran dan tujuan kebijakan dapat tercapai pada waktu yang ditentukan sehingga siklus investasi dapat berjalan dengan baik.

2. Untuk masyarakat agar tidak tergantung pada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kemudian dalam penggunaannya agar benar-benar untuk memenuhi kebutuhan hidup lebih tepatnya dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan agar sasaran tujuan pemberian bantuan tersebut dapat tercapai.
3. Untuk bantuan pemerintah bagi lembaga masyarakat agar dipergunakan sebaik mungkin dan benar-benar disalurkan sesuai dengan sasaran pemberian bantuan sehingga kedepannya dengan adanya alokasi dana bantuan sosial oleh pemerintah dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar supaya sasaran dan tujuan pemberian bantuan tersebut dapat tercapai yaitu kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Damodar N. Gujarati and Dawn C. Porter. 2012.** Dasar-dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat.
- Hikmat, Harry, 2004.** *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Penerbit Humaniora.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004.** Metode Kuantitatif : Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Muri, A Yusuf. 2014.** Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan. Jakarta : PT. Fajar Intrapratama Mandiri
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011** tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di akses 04 desember 2017.
http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id/peraturan/Permendagri_No_32_th_2011_ttg_Hibah_Bansos.pdf.
- Sarwoko, 2005.** Dasar-dasar Ekonometrika. Yogyakarta : ANDI.
- Santoso, Singgih. 2012.** Analisis SPSS pada Statistik Parametrik. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sukirno, Sadono. 1997.** Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sadono. 2006.** Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan: PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Supriatna, Tjahya. 1997.** Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan, Bandung. Humaniora Utama.
- Sunariyah. 2003.** Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Wiyono, Gendro. 2011.** Merancang penelitian bisnis dengan alat analisis spss 17.0 & Smart PLS 2. 0. Yogyakarta: Pencetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. 2017.** Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews, UPP STIM YKPN : Yogyakarta.